



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IVAN HARIADI HERMAWAN, SH**

Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. HADIONO, ST**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

Drs. HADIONO, ST

NIP. 19610614 198903 1 006

Pihak Pertama,

IVAN HARIADI HERMAWAN, SH

NIP. 19691218 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Perencanaan

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Bahan pelaporan Kinerja OPD/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6
	– Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
	– Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.300.000	APBD
	– Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.800.000	
	– Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.500.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



Dis. ZANUONO, ST
NIP. 19690614 198903 1 006

Pihak Pertama,

IVAN HARIADI HERMAWAN, SH
NIP. 19691218 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI IMTIKHANAH, SE.M,SI**

Jabatan : Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. HADIONO, ST**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak kedua,

Drs. HADIONO, ST
NIP. 19690614 198903 1 006

Pihak Pertama,

SRI IMTIKHANAH, SE.M,SI
NIP. 19730110 199803 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasubag Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	dokumen	1
	– Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64
	– Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
	– Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.022.355.000	APBD
	– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.932.364.000	
	– Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 54.640.000	
	– Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 35.351.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak kedua,



Drs. RADIONO, ST
NIP. 19690614 198903 1 006

Pihak Pertama,



SRI IMTIKHANAH, SE.M, Si
NIP. 19730110 199803 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI SUDARMI, SE**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. HADIONO, ST**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak kedua,

Drs. HADIONO, ST
NIP. 19690814 198903 1 006

Pihak Pertama,

SRI SUDARMI, SE
NIP. 19680724 199301 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasubag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananaya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
	- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2
3	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	- Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang yang dilaksanakan	Unit	1
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Discdiakan	Unit	1
5	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13
6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	– Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.331.000	APBD
	– Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2.331.000	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000	
	– Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 4.000.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 36.108.000	
	– Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.332.000	
	– Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.652.000	
	– Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 800.000	
	– Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 6.660.000	
	– Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 2.664.000	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.353.000	
	– Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.353.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.140.842.000	
	– Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.165.000	
	– Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 242.564.000	
	– Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.897.113.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 122.428.000	
	– Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 110.768.000	
	– Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.660.000	

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 5.000.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak Pertama,

SRI SUDARMI, SE
NIP. 19680724 199301 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI SETIANTO, SE**

Jabatan : Sub Koordinator Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **UDJI WINANTO, SE**

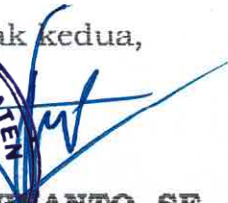
Jabatan : Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak kedua,

UDJI WINANTO, SE
NIP. 19730422 199903 1 002



Pihak Pertama,

BUDI SETIANTO, SE
NIP 19670909 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Industri

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Izin usaha industri yang mendapat rekomendasi/ Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang mendapat rekomendasi	%	90
	– Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2	Pendataan Industri di Kab. Purbalingga/ Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Industri di Kab. Purbalingga	Industri	300
	– Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 4.000.000	APBD
	– Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 4.000.000	
2.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 4.000.000	
	– Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 4.000.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak kedua,



UDJANWANTO, SE
NIP 19670422 199903 1 002

Pihak Pertama,



BUDI SETIANTO, SE
NIP 19670909 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. MARTHA DWI H.**

Jabatan : Sub Koordinator Distribusi Perdagangan pada Bidang
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WASIS PAMBUDI, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

Dra. MARTHA DWI H.

NIP. 19670714 199303 2 008



Pihak Kedua,

WASIS PAMBUDI, SE, M.Si
NIP. 19721122 199702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Distribusi Perdagangan

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersusunnya laporan monev ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat/ Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan monev yang disusun	Lap	12
	- Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat/ Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12
2.	Tersusunnya laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting/ Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan monev yang disusun	Laporan	12
	- Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota/ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	12

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Tersusunnya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi/ Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang disusun	Laporan	12
	- Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi/ Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	12

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.321.568.000	APBD
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp. 11.288.000	
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 14.485.000	
	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 14.485.000	
3.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.994.000	
	- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp. 5.994.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



WASIS KAMBUDI, SE, M.Si
NIP. 19721122 199702 1 001

Pihak Pertama,

Dra. MARTHA DWI H.
NIP. 19670714 199303 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INRIANI, SP**

Jabatan : Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WASIS PAMBUDI, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

WASIS PAMBUDI, SE, M.Si
NIP. 1972122 199702 1 001

Pihak Pertama,


INRIANI, SP
NIP. 19780612 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terfasilitasinya perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan/ Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah perizinan yang difasilitasi	Dokumen	2
	– Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2
2.	Terfasilitasinya izin gudang / Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang mendapat rekomendasi	Dokumen	2
	– Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang / Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	2
3.	Terkendalinya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat / Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan dalam rangka monitoring ketersediaan Barang	Laporan	12

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat / Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12
4.	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor / Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan dilatih	Pelaku Usaha	30
	- Meningkatnya Citra Produk Ekspor	"Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi"	Produk	30

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp. 4.996.000	APBD
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 4.996.000	
2.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp. 4.996.000	
	- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp. 4.996.000	
3.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.321.568.000	

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp. 2.310.280.000	
4.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.960.000	
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.960.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

WASIS AMBUDI, SE, M.Si
NIP. 19721122 199702 1 001

Pihak Pertama,

INRIANI, SP
NIP. 19780612 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADI NARWANTO**

Jabatan : Sub Koordinator Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WASIS PAMBUDI, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

WASIS PAMBUDI, SE, M.Si
NIP. 19721122 199702 1 001

Pihak Pertama,

Drs. ADI NARWANTO
NIP. 19670319 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Pemberdayaan Pedagang Kali Lima

No.	Rencana Kinerja Operasional Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terbinanya dan terkendalinya pengelola sarana distribusi perdagangan / Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah bulan yang difasilitasi	Bulan	12
	– Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 49.169.000	APBD
	– Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 49.169.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



WASIS PAMEYDI, SE, M.Si
NIP. 19721221 199702 1 001

Pihak Pertama,



Drs. ADI NARWANTO
NIP. 19670319 200701 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH. MUNIB ZUHDI, SE.**

Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **EDY SUWARNO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

EDY SUWARNO, S.Sos
NIP. 19711008 199703 1 002

Pihak Pertama,

MUH. MUNIB ZUHDI, SE.
NIP 19671204 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**Unit Kerja : Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan**

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan perdagangan/ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	Persen	100
	- Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	21

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.098.480.000	APBD
	- Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.378.480.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

EDY S. HARNO, S.Sos
NIP 196711008 199703 1 002

Pihak Pertama,

MUH. MUNIB ZUHDI, SE.
NIP 19671204 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TITIEN NURHAYATI, S.Sos**

Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan pada Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **EDY SUWARNO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2025



Pihak kedua,

EDY SUWARNO, S.Sos

NIP. 11008 199703 1 002

Pihak Pertama,

TITIEN NURHAYATI, S.Sos

NIP. 19700516 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

No.	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya sarana prasarana pasar/ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direvitalisasi/dibangun	pasar	1
	- Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	1

No.	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.098.480.000	APBD
	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 720.000.000	

Purbalingga, 02 Januari 2025



Pihak kedua,

PENG SUWARNO, S.Sos
NIP. 19711008 199703 1 002

Pihak Pertama,

TITIEN NURHAYATI, S.Sos
NIP. 19700516 201406 2 001